

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab V ini peneliti menyajikan simpulan dari hasil penelitian mengenai “Pembinaan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*” dan memberikan penjelasan mengenai implikasi penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta rekomendasi yang ditujukan baik kepada para pembuat kebijakan, pengguna hasil penelitian dan peneliti selanjutnya.

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan di dalam bab IV, peneliti menarik kesimpulan bahwa pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) berbeda dengan sekolah nasional pada umumnya, hal ini dikarenakan dominansi penggunaan kurikulum internasional dalam sistem sekolah dan keberagaman siswa menjadi faktor utama bagi sekolah dalam merancang pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang sesuai dengan kebutuhan siswa WNI.

Kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki siswa WNI di *Bandung Independent School* mengalami disparitas dan *disequilibrium* dikarenakan faktor keberagaman yang mencakup latar belakang keluarga, kewarganegaraan, dan pengalaman siswa. Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School* secara khusus dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Melalui pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) tersebut diharapkan siswa WNI memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai warga negara Indonesia dan warga global. Hal menarik yang ditemukan di *Bandung Independent School* adalah sekolah

mengkombinasikan kurikulum *International Baccalaurate* (IB) dan kurikulum nasional (K-13) dalam upaya pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*), oleh karena itu dalam prakteknya di lapangan *Bandung Independent School* merancang program pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa WNI dan tujuan pendidikan nasional dan internasional. Pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* tidak luput dari adanya kendala dan hambatan baik secara internal dalam diri siswa WNI maupun pada guru dan sekolah. Oleh karena itu dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan, kendala dan hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama dan upaya dari berbagai pihak baik dari siswa WNI, guru, sekolah dan peran orang tua dalam mendukung upaya perbaikan dan peningkatan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School*.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti secara khusus menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.2.1 Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) yang dimiliki Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*.

Kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang dimiliki oleh siswa WNI di *Bandung Independent School* pada awal persekolahan bersifat heterogen, hal ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, kewarganegaraan serta pengalaman siswa. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang dimiliki siswa WNI di *Bandung Independent School* mengalami disparitas dan *disequilibrium*. Disparitas adalah kesenjangan pengetahuan yang ditemukan pada siswa WNI di dalam kelas yang sama dikelompokkan menjadi rendah, sedang dan tinggi terkait pemahaman siswa WNI terhadap konsep, teori dan materi kewarganegaraan. Selain itu *disequilibrium* atau ketidakmerataan pengetahuan terkait tingkatan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap konsep, teori dan materi kewarganegaraan yang tidak sesuai dengan tingkatan level kelas.

Disequilibrium yang ditemukan pada siswa WNI di *Bandung Independent School* diklasifikasikan menjadi *surface knowledge* pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), *deep knowledge* pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMP), *constructed knowledge* pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA), sehingga masih ditemukan siswa WNI di tingkat SMA memiliki pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang bersifat *surface knowledge dan deep knowledge*. Keterampilan dan watak kewarganegaraan yang dimiliki siswa WNI bersifat *international mindness* sehingga siswa WNI memiliki keterampilan sebagai *IB learner Profile* dan karakter yang dimiliki siswa WNI lebih dominan berkaitan dengan peran siswa sebagai bagian dari warga global.

5.1.2.2 Pelaksanaan Pembinaan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*

Pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) siswa WNI di *Bandung Independent School* dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler berkaitan dengan pembelajaran dikelas dan termasuk kedalam kurikulum pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 tahun 2014 secara khusus siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, *Indonesian Studies*, Pendidikan Bahasa Indonesia, dan *Language Acquisition* atau penguasaan Bahasa Indonesia.

Kegiatan kokurikuler dilaksanakan melalui program penguatan maupun pengembangan diri siswa yang dilaksanakan diluar jam pelajaran. Bentuk kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan di *Bandung Independent School* adalah program pelayanan yang terdiri dari *service activity* (SA) untuk kelas 10 dan *creativity, activity dan service* (CAS) untuk kelas 11-12. Program pelayanan ini dilaksanakan setiap hari senin, rabu, kamis dan jum'at pada *Dragon Time* (11-55-12.35). Kegiatan kokurikuler lainnya adalah perayaan hari besar nasional dan internasional yang diintegrasikan

baik melalui mata pelajaran wajib maupun kegiatan di luar kelas. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam sekolah dengan tujuan menggali potensi, minat dan bakat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di *Bandung Independent School* yang termasuk dalam upaya pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI adalah klub peluang kepemimpinan dan klub layanan, kedua klub tersebut mendorong siswa WNI untuk mengambil kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin masa depan maupun terlibat dan berpartisipasi aktif dalam klub pelayanan sebagai volunteer baik di dalam sekolah maupun luar sekolah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5.1.2.3 Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) yang dikembangkan pada Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*

Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang diupayakan bagi siswa WNI di *Bandung Independent School* diantaranya mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*). Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang dikembangkan diantaranya pengetahuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia yang mencakup pengetahuan dan pemahaman siswa WNI dalam mengenali identitas dan hubungan yang berkaitan dengan jati diri bangsa, hak, kewajiban dan peran sebagai warga negara Indonesia, serta berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun pengetahuan lainnya berkaitan dengan kewarganegaraan dalam konteks global yaitu memberikan pemahaman bagi siswa WNI terkait perannya sebagai bagian dari warga global.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang dikembangkan diantaranya keterampilan abad ke-21 yang meliputi keterampilan hidup dan karir, keterampilan dalam pembelajaran dan inovasi serta keterampilan dalam memanfaatkan informasi, media dan teknologi yang menunjang siswa WNI untuk dapat memenuhi tuntutan dan perkembangan zaman,

sehingga siswa WNI memiliki keterampilan berpikir kritis dan memecahkan permasalahan (*critical thinking and problem solving*), kreatif dan inovatif (*creativity and innovation*), berkomunikasi dengan baik (*communication*) dan kemampuan berkolaborasi (*collaboration*). Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang dikembangkan adalah karakter siswa WNI yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan karakter bangsa yang mencakup nilai religius (beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia), kemandirian, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong (kerjasama) dan berkebhinekaan global, selain itu siswa WNI juga dikembangkan agar memiliki sikap *IB Learner Profile*.

5.1.2.4 Kendala dan Upaya dalam Pembinaan Kompetensi Kewarganegaraan (*Civic Competences*) Siswa Warga Negara Indonesia di *Bandung Independent School*

Pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) tidak luput dari adanya kendala dan hambatan yang ditemukan baik pada siswa WNI, guru maupun sekolah. Hambatan internal yang ditemukan pada siswa WNI diantaranya *third children culture* atau siswa WNI dengan budaya ketiga yang menyebabkan munculnya *gap* (kesenjangan) baik dalam pengetahuan maupun keterampilan kewarganegaraan dan kemampuan berbahasa Indonesia siswa WNI yang heterogen. Hambatan eksternal siswa WNI berkaitan dengan terjadinya *learning loss* selama masa pandemi covid-19 yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar. Hambatan dan kendala yang ditemukan pada guru bersifat heterogen atau berbeda-beda sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Berikut ini rangkuman kendala dan hambatan yang ditemukan pada guru diantaranya: (1) kurang maksimalnya jam mata pelajaran terutama bagi kelas agama yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali (40 menit); (2) adanya *combine class* atau gabungan kelas dengan tingkat/level yang berbeda di kelas PPKn dan pendidikan agama yang menyebabkan munculnya *disequilibrium* dalam pengetahuan siswa WNI terkait materi pelajaran; (3) kelas *Indonesian studies* yang diperuntukkan bagi siswa WNI yang mengambil *additional language* berdampak di semester 2 siswa WNI

tidak masuk ke kelas PPKn yang menyebabkan kesejangan materi dan tujuan pembelajaran di kelas PPKn dan *Indonesian Studies*; (4) penggunaan bahasa Indonesia yang belum optimal dan maksimal digunakan oleh siswa WNI di kelas mata pelajaran wajib dikarenakan tingkat kemampuan berbahasa Indonesia yang heterogen; (5) pelaksanaan kegiatan sekolah yang belum berjalan optimal dikarenakan pandemi covid-19.

Kendala dan hambatan yang ditemukan di *Bandung Independent School* berkaitan dengan kurikulum dan kebijakan sekolah tahun ajaran 2021-2022, hambatan tersebut diantaranya belum maksimal dan optimalnya penggunaan kurikulum nasional (K-13) terhadap dominansi kurikulum internasional yang digunakan sekolah, selain itu visi, misi dan tujuan sekolah yang meliputi *IB Learner Profile* sedangkan siswa WNI memiliki tujuan yang harus dicapai berdasarkan tujuan nasional serta kebijakan pembelajaran *hybrid learning* selama pandemi covid-19 menyebabkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler kurang berjalan dengan optimal dan maksimal.

Upaya yang dilakukan siswa WNI dan guru dalam menyelesaikan hambatan dan kendala dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* diantaranya: (1) sekolah dan guru merancang kegiatan pembiasaan (*habituation*) melalui pendekatan interventif bagi siswa WNI dengan mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa mencakup pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas mata pelajaran wajib dan penguatan *apersepsi*; (2) mengatasi disparitas dan *disequilibrium* pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan siswa WNI melalui seleksi awal untuk mengukur dan menyusun komponen pembelajaran maupun modul yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa; (3) mengembangkan pendidikan karakter yang dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan (*living values*); (4) pengembangan pembelajaran tutor sebaya bagi siswa WNI dalam reaktulturasi maupun asimilasi budaya; (5) merancang metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif; (6) *sharing session* berkala dengan siswa WNI; (7) *reward* sebagai bagian dari

reinforcement pembelajaran; (8) mengintegrasikan kurikulum nasional (K-13) dan kurikulum *International Baccalaurate* (IB) baik melalui cara adaptasi maupun adopsi.

Upaya dan strategi yang dilakukan oleh *Bandung Independent School* untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI diantaranya: (1) bekerjasama dan menjalin komunikasi baik dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dinas pendidikan terkait, dan perkumpulan sekolah SPK se-Indonesia; (2) melibatkan guru mata pelajaran wajib untuk bergabung dengan forum musyawarah guru mata pelajaran (MGMP); (3) *parent sharing session* sebagai sarana untuk menjalin komunikasi dan kordinasi antara sekolah dan orangtua dengan tujuan untuk membahas perkembangan siswa di sekolah terutama berkaitan dengan kemajuan, hambatan dan kendala yang ditemui siswa WNI selama pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*).

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik implikasi yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut.

5.2.1 Implikasi Umum

5.2.1.1 Implikasi Teoritis

Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* berimplikasi pada penerapan teori kewarganegaraan republikan pada *outcomes* pembelajaran yang mengarahkan siswa WNI menjadi warga negara yang aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI berdampak pada penerapan interpretasi maksimal di pembelajaran PPKn yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa WNI di *Bandung Independent School* sehingga mempengaruhi dominansi kurikulum yang diterapkan di sekolah khususnya bagi siswa WNI.

5.2.1.2 Implikasi Praktis

Kegiatan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* berimplikasi pada pelaksanaan pembinaan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang mengarahkan siswa WNI untuk mengembangkan identitas dan jati diri sebagai warga negara Indonesia dan warga global dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI berdampak pada keterampilan guru dan sekolah yang harus dimiliki dalam mengembangkan kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman, mengeksplorasi potensi, mengimplementasikan serta mempraktekkan wawasan dan keterampilan yang dimiliki siswa WNI melalui kontribusi dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat baik dalam konteks lokal maupun global.

5.2.2 Implikasi Khusus

5.2.2.1 Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* meningkatkan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

5.2.2.2 Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* menjadi *outcomes* dari tujuan pendidikan nasional yaitu penguatan dan pembentukan nilai-nilai karakter bangsa (*nations and character building*).

5.2.2.3 Pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di *Bandung Independent School* memenuhi tuntutan siswa untuk memiliki keterampilan abad ke-21 yaitu siswa WNI memiliki keterampilan hidup dan karir, keterampilan dalam pembelajaran dan inovasi serta keterampilan dalam memanfaatkan informasi, media dan teknologi sesuai perkembangan zaman.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka peneliti mengajukan rekomendasi baik berupa saran dan masukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil penelitian ini terutama yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK). Berikut ini rekomendasi yang diajukan oleh peneliti diantaranya:

5.3.1 Bagi Pengambil Kebijakan

5.3.1.1 Penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan dan kajian oleh pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI khususnya di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK).

5.3.1.2 Pemerintah dapat memperkuat penerapan kurikulum nasional dan tujuan pendidikan nasional bagi siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan spesifik terkait standar kompetensi, standar isi, standar proses, standar penilaian dan teknis pelaksanaan mata pelajaran wajib di sekolah SPK.

5.3.1.3 Pemerintah dapat membuat modul dan pedoman bagi guru dan sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) dalam penerapan kurikulum nasional pada mata pelajaran wajib serta membuat sumber dan bahan ajar yang dapat digunakan oleh sekolah SPK disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.

5.3.2 Bagi Pengguna

5.3.2.1 Bagi Siswa

1. Penelitian ini dapat memberikan *insight* pemahaman kepada siswa khususnya siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) terkait pentingnya pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) dalam mendorong peran dan fungsi siswa sebagai warga negara Indonesia dan warga global sehingga siswa termotivasi untuk belajar.

2. Siswa dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) baik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
3. Siswa dapat mengembangkan keterlibatan dan partisipasi dalam masyarakat maupun komunitas melalui aksi nyata di lapangan.
4. Siswa dapat menggali dan mengembangkan potensi, minat dan bakat terutama dalam membangun kesadaran akan pentingnya kompetensi kewarganegaraan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara.

5.3.2.2 Bagi Orang Tua

1. Penelitian ini memberikan informasi dan masukan kepada orang tua sebagai *communities of character* pertama bagi siswa terkait pentingnya pendidikan karakter kewarganegaraan untuk ditanamkan sejak dini pada anak di dalam keluarga.
2. Orang tua dapat berkontribusi secara proaktif dalam memberikan dasar pengetahuan, keterampilan dan watak kewarganegaraan untuk mendorong perkembangan kompetensi kewarganegaraan siswa terutama sebagai warga negara Indonesia sebagai jati diri dan identitas bangsa.
3. Orang tua harus memberikan dukungan penuh kepada sekolah dan guru dalam pelaksanaan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) melalui perannya dalam memberikan pendampingan dan pengawasan bagi siswa serta memberikan teladan dan kebanggaan akan identitas siswa sebagai warga negara Indonesia dan warga global.

5.3.2.3 Bagi Guru

1. Penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada guru untuk merancang kegiatan dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI khususnya di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa WNI.
2. Guru secara ideal mengembangkan kemampuan dalam mengintegrasikan kurikulum internasional dan kurikulum nasional yang digunakan di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) sehingga guru dapat

mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Guru dapat menelaah dan melakukan refleksi terkait hasil pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) pada siswa WNI sehingga kedepannya mampu menetapkan langkah ideal dalam memberikan penguatan terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa.
4. Guru dapat membuat modul dan bahan ajar yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan siswa untuk membantu memberikan tambahan teori, konsep, materi dan pemahaman bagi siswa yang heterogen.

5.3.2.4 Bagi Sekolah

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) untuk menentukan kebijakan yang ideal dalam upaya pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) khususnya bagi siswa WNI.
2. Sekolah dapat mengembangkan kemampuan menganalisis dan mengintegrasikan kurikulum internasional dan kurikulum nasional dalam merancang kebijakan dan kegiatan dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) serta menginternalisasikan nilai-nilai karakter bangsa bagi siswa WNI.
3. Sekolah menjadi pelaksana dan pengawas dalam upaya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan siswa WNI serta perlunya memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK).

5.3.2.5 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

1. Departemen pendidikan kewarganegaraan dapat memperbanyak bahan rujukan dan kajian yang relevan dan berkaitan dengan pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK), hal ini bertujuan untuk membangun perspektif dan wawasan yang luas terhadap peran dan fungsi pendidikan kewarganegaraan terutama dalam konteks lokal dan global.

2. Departemen pendidikan kewarganegaraan dapat mewadahi dan mengorganisasikan penelitian berbasis pengembangan *project citizen* dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) sehingga menggali kebaruan dalam khazanah ilmu pengetahuan dan praktek di lapangan.
3. Perlunya pengembangan konteks pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang lebih luas dan mendalam baik konteks lokal dan global sehingga memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pengembangan kompetensi kewarganegaraan yang ideal.

5.3.2.6 Bagi Akademisi dan Praktisi Pendidikan

1. Para akademisi dan praktisi pendidikan dapat melakukan kajian secara mendalam terkait pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang ideal bagi siswa WNI di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK) yang disesuaikan dengan latar belakang keluarga, kewarganegaraan dan pengalaman siswa.
2. Para akademisi dan praktisi pendidikan perlu keseriusan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa dalam pembinaan kompetensi kewarganegaraan siswa WNI, hal ini diupayakan agar siswa memiliki kesadaran akan bangsa dan negara.

5.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

- 5.3.3.1 Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat mengkaji dan memperdalam penelitian terkait pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) secara khusus dan spesifik dengan memfokuskan pada aspek pendidikan kewarganegaraan bagi siswa WNI yang dirancang secara variatif dan komprehensif.
- 5.3.3.2 Peneliti selanjutnya dapat mengkaji dan meneliti lebih mendalam terkait upaya pembinaan kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) melalui pengintegrasian *service activity* dalam kurikulum nasional khususnya di sekolah satuan pendidikan kerjasama (SPK).